PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, *FISCAL STRESS* DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016-2023

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

ANGGIRIANI PUTRI
NIM. B1011181037

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Anggiriani Putri
NIM	:	B1011181037
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir (TA)	:	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress* dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya mejadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut diatas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 25 Juni 2025



Anggiriani Putri

NIM. B1011181037

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Anggiriani Putri
NIM	:	B1011181037
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir (TA)	:	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress* dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tigas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 25 Juni 2025



Anggiriani Putri

NIM. B1011181037

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2023

Penanggung Jawab Yuridis

Anggiriani Putri
B1011181037

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 25 Juni 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Faishol Luthfi, S.E., M.S.E.I. NIP. 199307212022031012	9 Juli 2025	
2.	Ketua Penguji	Yanto, S.E., M.Sc. NIP. 197706152003121004	7 Juli 2025	
3.	Anggota Penguji	Romi Suradi, S.E.I., M.E. NIP. 198610022019031004	9 Juli 2025	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 17 JUL 2025
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP. 197706152003121004

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat , rahmat , karunia serta mukjizar-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **"Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress* dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2023"**. Tugas Akhir yang telah penulis susun dengan baik ini merupakan syarat dalam memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat tersusun dengan baik berkat banntuan, dukungan bimbingan saran serta doa dari banyak pihak. Sehinggga dalam kesempatan ini, dengan tulus dan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada banyak pihak, yaitu:

1. Ibu Dr. Hj. Barkah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus dosen penguji utama, yang telah memberikan berbagai saran dan motivasi selama penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Faishol Lutfhi, S.E., M.S.E.I. selaku dosen pembimbing sekaligus figur orang tua bagi penulis selama perkuliahan, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, dukungan, dan semangat, sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Bapak Romi Suradi, S.E.I., M.E. selaku dosen penguji kedua penulis yang telah memberikan berbagai masukan berharga dalam penyempurnaan Tugas Akhir ini.
6. Bapak dan ibu dosen khususnya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, yang telah membagikan ilmu, pengajaran, dan pengalaman berharga selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, Perpustakaan dan seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak membantu penulis dalam hal administrasi maupun biokrasi.
8. Ibu tercinta, Ibu Fatimah Ahmad, yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan tanpa lelah selama perjalanan akademik hingga penyelesaian Tugas Akhir ini. Terima kasih atas segala kesabaran, pengorbanan, dan ketulusan yang menjadi sumber kekuatan penulis.
9. Ayah tersayang, Alm. Mahmud A. Kadir, sosok yang telah memberikan kasih sayang, kebijaksanaan, dan doa terbaiknya. Walaupun beliau telah tiada, ajaran dan kenangan indahnya tetap menjadi pegangan dalam hidup penulis.

10. Untuk keluarga besar lainnya, Tante Misa, Om Hanafi, Om Budi, yang selalu mendukung dan mengingatkan penulis untuk tetap fokus menuntut ilmu. Terima kasih telah membangkitkan semangat penulis di saat-saat sulit sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
11. Yang selalu memotivasi untuk tidak menyerah mengerjakan Tugas Akhir ini, Wulan dan Alfi, terima kasih atas pertanyaan progres, masukan, serta keyakinan bahwa penulis mampu melewati semua rintangan.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan kenangan indah sepanjang masa kuliah. Terima kasih atas dukungan dari awal hingga akhir perkuliahan. Semoga kita semua sukses dan dapat berjumpa lagi di masa depan.
13. Yang selalu menjadi penyemangat, penyembuh dan penghibur ketika penulis merasa jenuh, antara lain EXO, Xavier LnDs, Wanderer & Al-Haitham GI. Terima kasih atas konten dari mereka yang memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
14. Dan yang paling penting, terima kasih Anggiriani Putri, terima kasih telah berjuang sekuat tenaga hingga akhir masa kuliah. Diri penulis ini telah membuktikan bahwa diri ini mampu bertahan melewati segala rintangan dan meraih gelar yang diimpikan.
15. *Last but not least*. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus.

Akhir kata, dengan kerendahan hati, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Pontianak, 25 Juni 2025



Anggiriani Putri

NIM. B1011181037

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, *FISCAL STRESS* DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016-2023

ABSTRAK

Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, *fiscal stress*, dan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan Barat periode 2016-2023. Data yang digunakan merupakan data panel, yang merupakan kombinasi data *time series* (delapan tahun) dan *data cross section* (empat belas kabupaten/kota) dengan pengujian hipotesis melalui analisis regresi data panel pendekatan *Random Effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan, *fiscal stress* berpengaruh negatif dan tidak signifikan, serta kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress*, Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, *FISCAL STRESS* DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016-2023

Oleh : Anggiriani Putri
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Kemakmuran rakyat sebagai amanat konstitusi diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan kemampuan pemerintah mengelola sumber daya untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dalam dua dekade otonomi daerah, pemerintah lokal diberi kewenangan mengatasi kelemahan sentralisasi seperti ketidakefisienan dan ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi setempat, sehingga daerah seperti Kalimantan Barat dapat memaksimalkan pengelolaan keuangan demi mendorong pembangunan. Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan produksi barang/jasa untuk kesejahteraan, realisasinya masih timpang akibat perbedaan geografis, sumber daya, dan kapasitas antardaerah. Desentralisasi fiskal menjadi solusi untuk memperkuat kemampuan daerah merancang kebijakan fiskal yang responsif, meski berisiko memperlebar jurang ekonomi antara wilayah mandiri (dengan pendapatan signifikan) dan daerah bergantung pada pusat. Tantangan utama meliputi *fiscal stress* (ketidakmampuan pendapatan daerah membiayai pengeluaran wajib) yang mengancam stabilitas anggaran, diperparah oleh pengeluaran tak terencana dan minim analisis dampak. Kinerja keuangan menjadi indikator kunci kemampuan daerah memenuhi kebutuhan operasional dan layanan publik melalui sumber pendapatan asli—terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup pajak, retribusi, hasil aset, dan pendapatan sah lain. Penurunan PAD tidak hanya mencerminkan buruknya pengelolaan keuangan tetapi juga meningkatkan ketergantungan pada dana pusat atau utang, sehingga menghambat pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Permasalahan

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat menunjukkan ketidakstabilan, mencapai puncak 5,66% (2017) dan terendah -1,79% (2020) akibat pandemi COVID-19, dengan kesenjangan antarkabupaten/kota yang semakin melebar karena perbedaan geografis, sumber daya, dan infrastruktur. Implementasi desentralisasi fiskal belum optimal karena hanya Kota Pontianak dan Singkawang yang mandiri fiskal (rasio desentralisasi >20%), sementara sebagian besar kabupaten bergantung pada dana pusat, memperparah ketimpangan perkotaan-pedesaan. *Fiscal stress* menjadi tantangan kritis, pendapatan fiskal tertinggi hanya menutupi 33,64% belanja daerah (Pontianak, 2019), dengan rata-rata daerah lain di bawah 20%, menyebabkan defisit anggaran dan penurunan layanan publik yang diperburuk pengeluaran tak terencana. Kinerja keuangan pun mengalami fluktuatif dengan pertumbuhan PAD tidak merata, contohnya Melawi capai 47,88% (2017) berkat

komponen non-pajak, sementara Kayong Utara anjlok akibat minim inovasi. Rendahnya kapasitas kelola aset dan pemanfaatan potensi lokal memicu ketimpangan alokasi anggaran, berdampak pada kualitas layanan publik dan daya saing ekonomi.

3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka sasaran penelitian adalah sebagai berikut.

1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.
2) Untuk menguji dam menganalisis pengaruh *fiscal stress* terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.
3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan tujuan untuk menguji atau menjelaskan pengaruh variabel independen yaitu desentraliasi fiskal, *fiscal stress*, dan kinerja keuangan terhadap variabel dependen yakni pertumbuhan ekonomi, yang telah dihipotesiskan oleh peneliti. Data yang diaplikasikan adalah data panel, yang menggabungkan data *time series* (2016-2023) dan data *cross section* (14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah melalui aplikasi *Microsoft Excel* dan *Eviews 12* untuk memberikan hasil pengujian hipotesis yang efisien dan akurat.

5. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model terbaik. Variabel desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, *fiscal stress* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kinerja keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Adapun kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1) Desentralisasi fiskal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan pengelolaan fiskal telah diserahkan ke daerah, sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat belum mampu mengoptimalkan potensi pendapatan dan pengeluaran daerah, dan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Akibatnya, desentralisasi belum menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata.

2) *Fiscal stress* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan fiskal yang dialami pemerintah daerah, terutama saat PAD rendah dibandingkan total belanja, belum secara langsung menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dimungkinkan karena peran besar dana transfer pusat yang mampu menutupi kekurangan fiskal daerah atau karena fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil sampai terjun ke arah negatif saat Pandemi Covid-19, sehingga dampak dari tekanan fiskal tidak terlalu dirasakan secara ekonomi.

3) Kinerja keuangan daerah, yang diukur melalui pertumbuhan PAD, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD dari tahun ke tahun menjadi faktor penting yang mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kinerja fiskal yang baik mencerminkan kapasitas fiskal yang lebih kuat dan kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunan yang produktif.

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diambil sebagai berikut:

1) Pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi penerimaan fiskal secara optimal dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan baru yang legal dan berkelanjutan, seperti pengelolaan aset daerah, peningkatan pajak dan retribusi daerah yang berbasis layanan publik, serta dukungan terhadap sektor UMKM.
2) Daerah-daerah yang masih mengalami fiscal stress perlu memperkuat perencanaan fiskal jangka menengah, serta meningkatkan kapasitas manajemen keuangan publik, agar tekanan fiskal tidak mengganggu program pembangunan jangka panjang.
3) Pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta mencegah kebocoran anggaran agar dotonomi daerah dapat berjalan optimal dan benar-benar memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
4) Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel tambahan seperti dana transfer atau efisiensi anggaran agar memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT i
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR ii
LEMBAR YURIDIS ii
UCAPAN TERIMAKASIH iii
ABSTRAK vi
RINGKASAN vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiii

1. PENDAHULUAN 1
2. KAJIAN LITERATUR 5
   2.1 Teori Ekonomi Keynesian 5
   2.2 Pertumbuhan Ekonomi 6
   2.3 Desentralisasi Fiskal 7
   2.4 *Fiscal Stress* 8
   2.5 Kinerja Keuangan Daerah 9
   2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 10
   2.7 Kajian Empiris 11
   2.8 Hubungan Antar Variabel Penelitian 13
      2.8.1 Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 13
      2.8.2 *Fiscal Stress* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14
      2.8.3 Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14
   2.9 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 15
      2.9.1 Kerangka Konseptual 15
      2.9.2 Hipotesis Penelitian 15
3. METODE PENELITIAN 15
   3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 15
   3.2 Metode dan Alat Analisis 17
      3.2.1 Analisis Regresi 17
      3.2.2 Pemilihan Model 17
      3.2.3 Uji Hipotesis 19
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 19
   4.1 Hasil Penelitian 19
      4.1.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel 19
      4.1.2 Analisis Regresi Linier Berganda 20
      4.1.3 Uji Hipotesis 21
   4.2 Pembahasan Penelitian 22
      4.2.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 22
      4.2.2 Pengaruh *Fiscal Stress* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 23

4.2.3 Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 25
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 26
5.1 Simpulan 26
5.2 Rekomendasi 27

DAFTAR PUSTAKA 27
LAMPIRAN 33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 2016-2023 2
Tabel 1.2 Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 2016-2023 3
Tabel 1.3 *Fiscal Stress* Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 2016-2023 3
Tabel 1.4 Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 2016-2023 4
Tabel 2.1 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal 8
Tabel 2.2 Matriks Penelitian Terdahulu 13
Tabel 4.1 Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier 19
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda Model REM 20
Tabel 4.3 Hasil Uji t 21
Tabel 4.4 Hasil Uji F 21
Tabel 4.5 Hasil Uji Koefesien Determinasi 22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 15

Gambar 4.1 Rata-Rata Desentraliasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 2016-20231 22

Gambar 4.2 Rata-Rata *Fiscal Stress* dan Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 2016-2023 24

Gambar 4.3 Rata-Rata Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 2016-2023 25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Sekunder Penelitian Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat (Data Diolah 33

Lampiran 2 Hasil Pengujian Eviews 39

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, *FISCAL STRESS* DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016-2023

Anggiriani Putri[1]

Universitas Tanjungpura, Indonesia

Faishol Luthfi, S.E., M.S.E.I.[2]

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study examines and analyzes the effect of fiscal decentralization, fiscal stress, and financial performance on economic growth in districts/cities of West Kalimantan for the 2016-2023 period. The data used is panel data, which is a combination of time series data (eight years) and cross-section data (fourteen regencies/cities) with hypothesis testing through the Random Effect approach panel data regression analysis. The results show that fiscal decentralization has a positive and insignificant effect, fiscal stress has a negative and insignificant effect, and financial performance has a positive and significant effect on economic growth.

Keywords: Fiscal Decentralization; Fiscal Stres; Financial Performance; Economic Growth.

ABSTRAK

Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, *fiscal stress*, dan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan Barat periode 2016-2023. Data yang digunakan merupakan data panel, yang merupakan kombinasi data *time series* (delapan tahun) dan *data cross section* (empat belas kabupaten/kota) dengan pengujian hipotesis melalui analisis regresi data panel pendekatan *Random Effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan, *fiscal stress* berpengaruh negatif dan tidak signifikan, serta kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal; *Fiscal Stress*; Kinerja Keuangan; Pertumbuhan Ekonomi.

1. PENDAHULUAN

Kemakmuran rakyat merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Indonesia, dan salah satu indikator utamanya adalah pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya demi meningkatkan pendapatan nasional (Yuni & Hutabarat, 2021). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang optimal bergantung pada kapasitas pemerintah dalam menerapkan prinsip tata kelola yang unggul. Sejak implementasi kebijakan otonomi daerah lebih dari 2 dekade lalu, pemerintah daerah telah memperoleh perluasan kewenangan dalam

[1] anggiriani1804@gmail.com

pengelolaan urusan domestik, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan, guna mengatasi berbagai kelemahan sistem sentralisasi seperti ketidakefisienan dan kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi lokal (Nuradhawati, 2019). Melalui desentralisasi ini, daerah seperti Kalimantan Barat berupaya mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi sendiri mencerminkan peningkatan produksi barang dan jasa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fajria & Wahono, 2021), meskipun realisasinya di berbagai kabupaten/kota masih menunjukkan ketimpangan akibat perbedaan kondisi geografis, sumber daya, dan kapasitas masing-masing wilayah.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 2016-2023

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Sambas	5.24	5.06	4.93	4.75	-2.04	4.37	4.64	4.69
Kab. Bengkayang	5.15	5.62	5.25	5.14	-1.99	4.33	5.45	4.68
Kab. Landak	5.28	5.17	4.92	4.88	-0.71	4.88	4.64	4.39
Kab. Mempawah	5.99	5.87	5.76	5.78	0.18	4.10	4.70	5.09
Kab. Sanggau	5.34	4.47	4.22	3.73	0.71	4.19	4.61	2.04
Kab. Ketapang	7.97	7.21	7.83	6.58	-0.49	5.23	5.42	1.10
Kab. Sintang	5.28	5.33	5.15	4.99	-2.19	3.80	4.96	4.68
Kab. Kapuas Hulu	5.28	5.39	4.66	3.80	-2.43	4.43	4.51	4.62
Kab. Sekadau	5.93	5.82	5.83	5.44	-0.98	4.31	5.10	4.69
Kab. Melawi	4.75	4.70	5.25	4.41	-1.11	4.54	4.90	4.56
Kab. Kayong Utara	5.98	5.37	4.94	4.97	-0.76	4.60	5.03	4.48
Kab. Kubu Raya	6.37	6.54	5.25	5.68	-2.39	5.18	5.48	4.98
Kota Pontianak	4.55	5.49	4.22	4.02	-3.96	4.61	4.97	4.76
Kota Singkawang	5.17	5.38	4.64	4.41	-2.51	4.82	4.97	5.06
Seluruh Kabupaten/Kota	**5.65**	**5.66**	**5.20**	**4.91**	**-1.79**	**4.62**	**5.00**	**4.02**

Sumber: BPS Kalimantan Barat, Data Olahan Peneliti Tahun 2025

Tabel 1.1 mengungkapkan dinamika perkembangan ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2017 di Kabupaten Ketapang (7,97%), sementara titik terendah tercatat di Kota Pontianak tahun 2020 (-3,96%). Sebelum pandemi, tren penurunan untuk seluruh kota/kabupaten sudah terlihat sejak 2017 hingga mencapai 4,91% di 2019. Krisis global akibat COVID-19 memperparah keadaan dengan menekan sektor ekonomi dan memicu kontraksi tajam. Namun, berkat langkah pemulihan seperti investasi infrastruktur, bantuan sektor terdampak, dan penyesuaian kebijakan, provinsi ini berhasil bangkit ke zona positif pada tahun berikutnya.

Meskipun pertumbuhan ekonomi menjadi indikator keberhasilan pembangunan, peningkatan tersebut tidak serta-merta menjamin pemerataan manfaat antardaerah (Todaro dalam Marpaung et al., 2021). Perbedaan potensi sumber daya, kondisi alam, dan sarana antardaerah berpotensi memperlebar jurang antara kawasan maju dan tertinggal. Solusinya memerlukan penyerahan kewenangan pengelolaan keuangan pusat ke daerah yaitu desentralisasi fiskal, guna memperkuat kemampuan lokal merancang kebijakan fiskal (Azis et al., 2022). Pendekatan ini tak hanya mencerminkan kemandirian, tetapi juga memungkinkan respons yang lebih tepat sasaran terhadap kebutuhan masyarakat seiring dengan berkurangnya ruang lingkup mereka (Murad dalam Nazikha & Rahmawati, 2021).

Wilayah dengan pendapatan daerah yang signifikan dan mandiri cenderung lebih unggul dibandingkan daerah yang masih bergantung pada anggaran pemerintah pusat. Daerah otonom ini juga lebih fleksibel dalam melayani kebutuhan masyarakat (Soekarwo

dalam Sulaiman, 2020). Namun di sisi lain, kebijakan desentralisasi fiskal ini juga berisiko meningkatkan disparitas (ketimpangan) yang tinggi antardaerah.

Tabel 1.2 Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 2016-2023

Kabupaten/Kota	Derajat Desentralisasi Fiskal (%)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Sambas	8.06	12.95	8.84	9.15	8.50	9.21	10.11	12.87
Kab. Bengkayang	6.56	6.18	6.62	6.33	8.31	8.51	8.68	9.43
Kab. Landak	6.41	11.47	8.00	8.03	9.42	10.30	7.93	10.31
Kab. Mempawah	7.55	9.22	8.67	9.51	11.30	12.28	16.82	11.40
Kab. Sanggau	9.31	11.56	11.29	10.24	10.93	14.93	14.60	18.75
Kab. Ketapang	13.19	14.54	13.89	10.83	14.74	19.79	16.68	18.13
Kab. Sintang	8.89	7.62	13.26	9.32	8.20	12.06	11.52	14.49
Kab. Kapuas Hulu	6.71	9.25	6.19	5.61	6.34	6.68	6.46	8.48
Kab. Sekadau	6.60	10.78	8.92	7.17	7.93	8.81	9.03	11.46
Kab. Melawi	5.27	7.09	6.06	4.49	5.14	7.66	7.44	10.44
Kab. Kayong Utara	4.56	3.73	5.81	5.22	7.21	6.78	8.85	8.84
Kab. Kubu Raya	8.94	15.31	13.23	11.89	11.41	12.08	15.07	14.31
Kota Pontianak	29.76	33.08	29.53	28.21	26.22	27.77	34.24	36.86
Kota Singkawang	14.30	17.36	16.32	18.71	19.03	18.72	26.68	22.45
Seluruh Kota/Kabupaten	**10.07**	**12.56**	**11.81**	**10.71**	**11.42**	**13.21**	**14.15**	**15.59**

Sumber: BPS Indonesia & DJPK Kemenkeu, Data Diolah (2025)

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan fluktuasi desentralisasi fiskal di Kalimantan Barat, dengan Kabupaten Kayong Utara mencatat tingkat terendah (3,73% pada 2017) dan Kota Pontianak tertinggi (36,86% pada 2023). Daerah dikategorikan mandiri secara fiskal jika tingkat desentralisasi fiskalnya melebihi 20% (Sistiana & Makmur, 2014). Kondisi ini menegaskan bahwa kapasitas fiskal daerah pinggiran belum mandiri dan masih memerlukan dukungan APBN.

Pertumbuhan ekonomi juga kerap dihambat oleh fenomena *fiscal stress*, yakni kondisi di mana pendapatan daerah tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran wajib, sehingga mengancam stabilitas anggaran (*budget solvency*) (DiNapoli, 2016). Tantangan ini menggarisbawahi ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah, terutama antara wilayah urban dan rural, dalam menjalankan otonomi keuangan secara optimal.

Tabel 1.3 *Fiscal Stress* Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 2016-2023

Kabupaten/Kota	Fiscal Stress (%)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Sambas	6.42	12.22	7.50	8.11	7.66	7.99	9.23	12.62
Kab. Bengkayang	3.87	4.18	5.03	5.30	6.24	5.87	6.58	6.60
Kab. Landak	4.23	9.65	6.00	6.74	7.64	7.61	5.36	7.02
Kab. Mempawah	5.89	7.42	7.46	8.60	10.42	9.74	14.91	9.23
Kab. Sanggau	6.37	9.89	7.83	7.39	7.85	8.40	9.64	7.43
Kab. Ketapang	6.90	8.43	8.99	8.41	10.79	12.36	9.53	8.33
Kab. Sintang	6.22	6.01	12.86	8.34	6.79	9.49	9.01	8.73
Kab. Kapuas Hulu	3.91	7.94	4.41	4.43	4.80	4.51	4.37	4.26
Kab. Sekadau	4.42	8.73	6.76	5.13	5.26	5.39	6.10	7.23
Kab. Melawi	2.49	6.94	4.11	3.44	3.03	5.09	4.77	6.44
Kab. Kayong Utara	1.51	1.63	3.70	3.81	5.23	4.18	5.83	4.86
Kab. Kubu Raya	7.72	14.88	12.00	10.94	10.15	9.70	13.22	10.77
Kota Pontianak	27.25	31.48	27.42	29.60	24.04	25.23	32.23	33.64
Kota Singkawang	12.44	16.33	15.44	19.12	18.19	16.65	25.07	23.27
Seluruh Kota/Kabupaten	**7.37**	**10.76**	**9.77**	**9.45**	**9.43**	**9.92**	**11.16**	**10.93**

Sumber: BPS Indonesia, Data Olahan Peneliti Tahun 2025

Tabel 1.3 memperlihatkan kondisi tekanan fiskal di kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Angka yang tercantum menunjukkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pengeluaran daerah, dengan fluktuasi mencolok antarwilayah. Kota Pontianak mencatat beban fiskal terendah pada 2019, di mana PAD-nya hanya sanggup membiayai 33,64% belanja daerah. Sebaliknya, Kabupaten Kayong Utara mengalami tekanan tertinggi (1,51% pada 2016), mencerminkan keterbatasan sumber pendapatan. Fenomena ini muncul akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan fiskal (utamanya peningkatan layanan publik) dan kemampuan keuangan daerah. Kenyataannya, penerimaan daerah kerap tak memadai untuk membiayai pengeluaran, khususnya belanja pembangunan. Rata-rata PAD hanya menutupi sekitar 20% kebutuhan belanja modal, membuktikan ketergantungan besar pada pendanaan luar (Kuncoro dalam Sitompul, 2022).

Pengeluaran yang tidak terencana dan minim analisis dampak fiskal berpotensi memperburuk defisit anggaran (Ramadana et al., 2023). Oleh karena itu, kinerja keuangan ditampilkan sebagai tanda yang bisa digunakan untuk melihat seberapa baik pemerintah daerah dapat menemukan sumber anggaran asli lokal dalam mencukupi kebutuhan mereka guna menyokong operasional pemerintahan dan layanan kepada publik tanpa sepenuhnya mengandalkan pada pemerintah pusat (Padang & Padang, 2024).

Tabel 1.4 Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 2016-2023

Kabupaten/Kota	Kinerja Keuangan (%)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Sambas	19.26	96.28	-36.27	16.59	-12.88	14.24	13.16	40.94
Kab. Bengkayang	8.14	6.83	10.82	5.01	0.92	17.31	33.32	2.31
Kab. Landak	23.55	117.92	-36.50	17.59	12.67	-6.47	-25.13	33.56
Kab. Mempawah	20.11	10.30	5.54	15.58	12.60	-2.50	60.64	-35.26
Kab. Sanggau	46.13	62.78	-22.66	-0.01	0.37	10.01	22.19	-11.22
Kab. Ketapang	10.38	24.85	13.28	3.75	17.11	25.82	-22.52	-11.15
Kab. Sintang	4.24	4.40	112.58	-28.39	-21.74	30.93	-8.02	8.05
Kab. Kapuas Hulu	-3.72	95.46	-42.08	5.23	-1.02	-0.64	-10.16	-1.08
Kab. Sekadau	9.26	98.86	-18.82	-23.23	3.57	-3.91	21.98	11.43
Kab. Melawi	6.33	169.82	-39.76	-0.64	-23.92	81.95	-11.57	57.13
Kab. Kayong Utara	-42.42	20.46	110.37	5.12	38.21	-12.95	33.93	-17.38
Kab. Kubu Raya	17.20	105.98	-11.60	-6.34	-12.63	6.55	21.13	-6.54
Kota Pontianak	16.73	22.26	-7.51	8.74	-15.79	2.54	30.09	11.13
Kota Singkawang	5.08	27.93	-0.93	27.00	-7.18	13.74	21.84	-1.11
Seluruh Kota/Kabupaten	**13.38**	**47.88**	**-6.91**	**2.27**	**-5.66**	**10.75**	**11.55**	**3.71**

Sumber: BPS Indonesia, Data Olahan Peneliti Tahun 2025

Tabel 1.4 menunjukkan fluktuasi kinerja keuangan Kalimantan Barat berdasarkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pencapaian tertinggi terjadi di 2017 (47,88%), tetapi angka ini terus menurun setelahnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan terbesar di Kabupaten Melawi pada 2017 yang menjadi daerah dengan performa terbaik, disebabkan oleh kenaikan komponen "Lain-Lain PAD yang Sah". Sebaliknya, Kabupaten Kayong Utara mencatat nilai terendah di 2016 karena penurunan drastis pada komponen yang sama, sehingga kontribusinya terhadap total PAD wilayah itu berkurang signifikan.

Penurunan kinerja keuangan mencerminkan adanya kemunduran jumlah kas yang tersedia untuk mendanai kegiatan program kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terkait. Situasi ini berdampak langsung pada mutu layanan publik, karena batasan

anggaran menyebabkan minimnya aktivitas pembangunan yang seharusnya dapat memperbaiki infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja keuangan yang memburuk mengurangi ketersediaan kas untuk program kerja pemda, berimbas pada penurunan kualitas layanan publik. Keterbatasan anggaran menghambat pembangunan infrastruktur dan upaya peningkatan kesejahteraan. Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai sumber pendanaan krusial, terdiri dari beberapa komponen utama: (1) pajak daerah (misalnya pajak kendaraan bermotor, hiburan, restoran, dan iklan), (2) retribusi daerah (seperti retribusi parkir, pasar, dan terminal), (3) hasil pengelolaan aset daerah (laba BUMD, sewa aset), serta (4) pendapatan sah lainnya (denda pajak, hasil penjualan aset tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, selisih kurs, dan komisi dari transaksi barang/jasa) (Tanan & Horo, 2024). Turunnya PAD tidak hanya mencerminkan kemunduran pengelolaan keuangan, tetapi juga melemahkan kemampuan daerah memenuhi kebutuhan fiskal. Akibatnya, ketergantungan pada dana pusat atau utang yang meningkat berpotensi mengganggu stabilitas anggaran jangka panjang.

Penelitian terdahulu mengidentifikasi kesenjangan akademis terkait hubungan tiga variabel independen—desentralisasi fiskal, *fiscal stress*, dan kinerja keuangan—dengan pertumbuhan ekonomi. Studi Puspita Sari et al. (2021) membuktikan bahwa pengaruh positif signifikan ketiga variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam temuan Fajria & Wahono (2021) mengungkap kontradiksi: desentralisasi fiskal berpengaruh positif tidak signifikan, sementara *fiscal stress* dan kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan. Penelitian ini juga menyatakan bahwa kinerja keuangan tidak berperan sebagai mediator antara desentralisasi fiskal dan *fiscal stress* dengan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Krisnawati & Elly (2022) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif signifikan, sedangkan *fiscal stress* berpengaruh positif signifikan, tanpa melibatkan kinerja keuangan sebagai variabel analisis.

Inkonsistensi hasil tersebut mempertegas urgensi penelitian lanjutan. Karakteristik unik wilayah ini, seperti disparitas sumber daya, kapasitas fiskal, dan dinamika kebijakan lokal, menjadi alasan kuat untuk menganalisis keterkaitan desentralisasi fiskal, *fiscal stress*, dan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.